



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2023

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sidoarjo**

Disusun Tahun 2024

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja.

Sidoarjo, 12 Pebruari 2024

**TIM SAKIP KAB. SIDOARJO,
SEKRETARIS**



Ditandatangani secara elektronik oleh

ARIF MULYONO, S.STP., M.HP.
NIP. 197804161997021001

ARIF MULYONO, S.STP., M.HP.
Pembina Tingkat I
NIP 19780416 199702 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama tahun 2023. Diharapkan LKjIP ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders, Tanggapan (feedback) serta saran-saran untuk perbaikan terhadap laporan yang kami susun sangat kami harapkan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

Sidoarjo, 20 Februari 2024

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. HERI SOESANTO, SH., MH
NIP. 196805191988031002

Dr. HERI SOESANTO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP 196805191988031002

DAFTAR ISI

PERTANYAAN TELAH DIREVIU	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	10
C. Perencanaan Anggaran Tahun 2023	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Pengukuran Kinerja	11
B. Realisasi Kinerja Anggaran	17
BAB IV PENUTUP	23
A. Kesimpulan	23
B. Pemecahan Masalah / Tindak Lanjut	23
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data ASN Sekretariat /Dinas/Badan/Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo	4
Tabel 1.2 Pemetaan Permasalahan pokok,Masalah ,dan Akar Masalah	5
Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Tahun 2023	9
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	10
Tabel 2.3 Rincian anggaran Tahun 2023	10
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023	11
Tabel 3.2 Tren Realisasi dari (IK) Tahun 2023	12
Tabel 3.3 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	12
Tabel 3.4 Program Penunjang keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja	13
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran	14
Tabel 3.6 Nilai SAKIP	15
Tabel 3.7 Tren Realisasi IK	15
Tabel 3.8 Nilai IPP	16
Tabel 3.9 Tren Realisasi dari (IK) Nilai IPP Tahun 2022 – 2023	16
Tabel 3.10 Nilai SKM	16
Tabel 3.11 Tren Realisasi dari (IK) Nilai SKM	17
Tabel 3.12 Analisis Efisiensi	18
Tabel 3.13 Capaian Kinerja dan Anggaran	21
Tabel 3.14 Realisasi Anggaran	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gambar Struktur Organisasi	3
Grafik 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023	13
Grafik 3.2 Tren Realisasi dari (IK) Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria IID 2023	14

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023
**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN SIDOARJO**



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo** Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas perjanjian kinerja Tahun 2023. Kami memiliki 3 sasaran strategis dan 6 indikator kinerja.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 6 indikator kerja, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 4 indikator;
- 2) Target dengan capaian realisasi 100% sebanyak 1 indikator;
- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 indikator.

Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu “Meningkatkan kualitas perencanaan dan kelitbangan daerah” dengan sasaran sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis.	Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%	Sangat Baik
2.	Meningkatnya kualitas kelitbangan daerah	Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria IID (Indeks Inovasi Daerah)	72%	87,76%	121,89%	Sangat Baik
3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai SAKIP	A (85,50)	A (86,57)	101,25%	Sangat Baik
		Nilai RB	32,67	-	-	Sudah tidak dilakukan penilaian sesuai Kepmen PANRB No.739/2023
		Nilai IPP	B (3,6)	B (3,76)	104,44%	Sangat Baik
		Nilai SKM	Sangat Baik (92,00)	Sangat Baik (96,56)	104,96%	Sangat Baik



BAB I PENDAHULUAN

1. Kedudukan

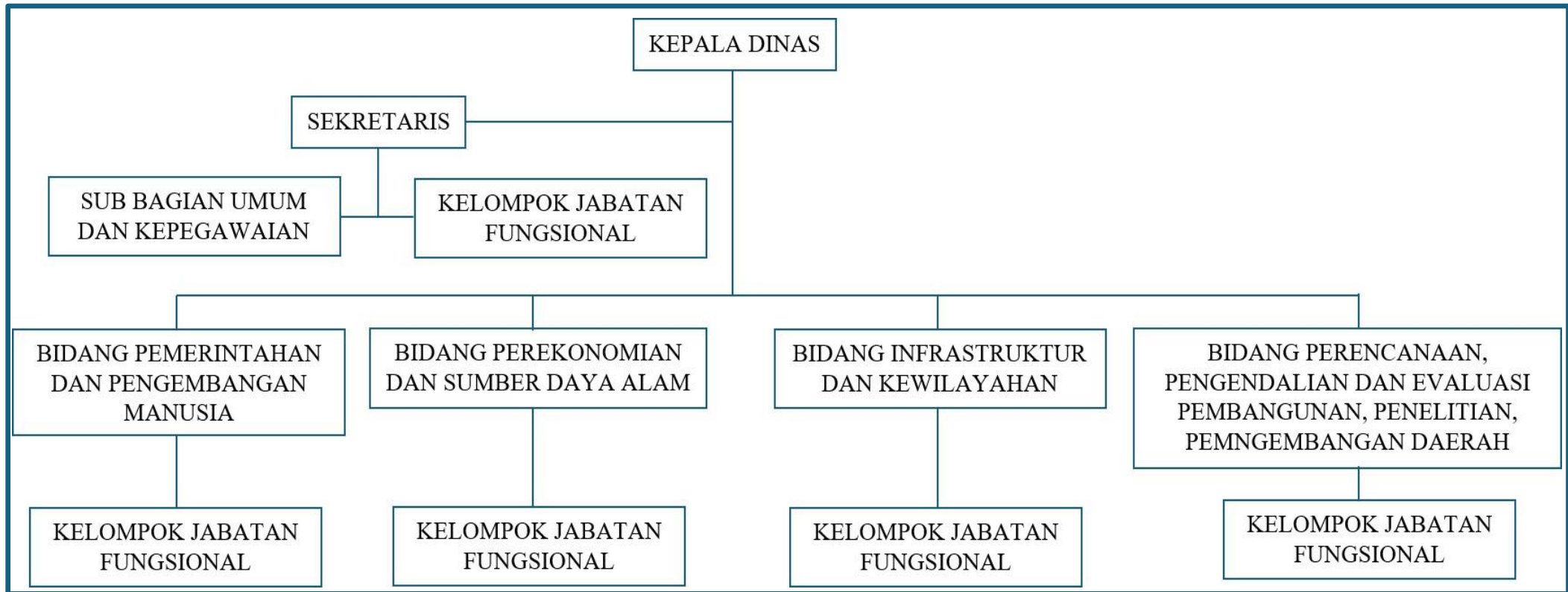
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan urusan pemerintahan pada fungsi Penunjang Perencanaan, dan fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan.

Melalui peraturan daerah diatas dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati Dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten pada fungsi Penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian, pengembangan dan data;
2. Pelaksanaan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Pengkoordinasian dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
4. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan daerah;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo maka disusun struktur organisasi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis.

Adapun susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Gambar Struktur Organisasi



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki ASN sebanyak 48 Orang dan Non ASN Sebanyak 8 orang. ASN tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Berikut data ASN pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023.

*Tabel 1. 1
 Data ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo*

No.	Jenis Jabatan	Jumlah	Existing
1	Kepala Bappeda	1	1
2	Administrator	5	5
3	Pengawas	1	1
4	Pelaksana	24	24
5	Jabatan fungsional Perencana Ahli Muda	8	8
6	Jabatan fungsional Perencana Pertama	3	3
7	Jabatan fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	1	1
8	Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Pertama	2	2
9	Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Muda	1	1
10	Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Pertama	1	1
11	Jabatan Fungsional Pranata Komputer Mahir	1	1
	JUMLAH	48	48

2. Aspek Strategis Organisasi

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.



Tabel 1. 2
Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
<p>Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan sektoral serta kelitbangan daerah</p>	<p>1. Masih rendahnya kesadaran PD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik</p> <p>2. Belum optimalnya usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam APBD</p> <p>3. Belum tersedianya peta sektoral dan tematik</p> <p>4. Belum optimalnya pelaksanaan mekanisme kelitbangan</p> <p>5. Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan menjadi kebijakan pembangunan daerah</p> <p>6. Belum optimalnya pengembangan inovasi dan</p>	<p>1. Perubahan terkait lingkungan strategis perencanaan pembangunan nasional, maupun perencanaan pembangunan daerah cenderung terjadi sangat cepat</p> <p>2. Tingginya tuntutan masyarakat akan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah</p> <p>3. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi terkait perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo</p> <p>4. Belum optimalnya koordinasi dan kesepahaman antar PD, serta komitmen dari masing-masing PD dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>5. Masih kurangnya kualitas SDM aparatur Bappeda dari sisi fungsional perencanaan</p> <p>6. Adanya pengalihan leading sector terkait tata ruang</p> <p>7. Proses revisi RTRW yang terhambat</p> <p>8. Proses revisi RTRW yang terhambat</p> <p>9. PD belum taat melaksanakan mekanisme kelitbangan</p> <p>10. Belum optimalnya fasilitasi mekanisme kelitbangan</p> <p>11. Dokumen penelitian dan pengembangan tidak berdasarkan rekomendasi kelitbangan</p> <p>12. Belum adanya policy brief sebagai rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan</p> <p>13. Pimpinan dan PD teknis belum optimal dalam pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan</p> <p>14. Belum optimalnya database hasil penelitian dan pengembangan</p>



teknologi	15. Belum dipahaminya tata cara dan bentuk pengembangan inovasi dan teknologi
7. Belum optimalnya pengukuran kematangan inovasi dan daerah	16. Belum optimalnya penjangkaran inovasi dan teknologi
8. Belum optimalnya pengukuran daya saing daerah	17. Belum optimalnya pelaporan inovasi dan teknologi
	18. Belum optimalnya PD dalam memenuhi data pendukung dan teknologi 19. Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor dalam pengisian data pendukung
	20. Banyak data sektoral yang tidak valid/tidak tersedia

Sumber : Renstra 2021-2026



Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya antara monitoring dan evaluasi sebagai dampak atau outcome pada program dan kegiatan renstra yang telah disusun terhadap pencapaian pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo
2. Belum optimalnya fungsi kelitbangan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo
3. Kejelasan tindak lanjut pada monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang bisa adanya wujud dampak atau outcome yang dihasilkan pada program dan kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo
4. Belum optimal inovasi daerah untuk pengembangan daerah dalam memenuhi kriteria IID



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki Visi “Mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan”. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah:

1. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha.
2. Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan focus pada kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.
3. Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan berkelanjutan lingkungan.
4. Membangun sumber daya manusia unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang Pendidikan, Kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya.
5. Mewujudkan Masyarakat religious yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Sidoarjo maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2026. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Berikut Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut :

Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 adalah “Meningkatkan kualitas perencanaan dan kelitbangan daerah”.

Sasaran :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis
2. Meningkatnya kualitas kelitbangan daerah
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah



Tabel 2. 1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026

NO	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan kelitbangan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis	Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas kelitabangan daerah	Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria IID	70%	70%	72%	74%	76%	78%
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	a. Nilai SAKIP b. Nilai RB c. Nilai IPP d. Nilai SKM	-	a. A b. 32,67 c. B d. Baik	a.A (85,50) b. 32,67 c. B (3,6) d. Sangat Baik (92,00)	a.A (85,51) b. 32,68 c. B (3,61) d. Sangat Baik (92,00)	a.A (85,52) b. 32,69 c. B (3,62) d. Sangat Baik (92,00)	a.A (85,53) b. 32,70 c. B (3,63) d. Sangat Baik (92,00)

Sumber : Rnstra 2021-2026



B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya. Berikut Perjanjian kinerja tahun 2023 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja.

Tabel 2. 2
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis	Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan RPJMD	100%
2	Meningkatnya kualitas kelitabangan daerah	Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria IID	72%
3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	a. Nilai SAKIP	A (85,50)
		b. Nilai RB	32,67
		c. Nilai IPP	B (3,6)
		d. Nilai SKM	Sangat Baik (92,00)

C. Perencanaan Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka disediakan anggaran sebesar Rp.16.486.346.384,00 Namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, maka anggaran yang telah tersedia dilakukan perubahan dan *refocusing*. Oleh Karena itu, alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 621.187.603,00 dengan rincian sebagai mana tabel 2.3,

Tabel 2. 3
Rincian anggaran pada tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.719.498.612,00	12.533.672.687,00
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.524.449.866,00	1.298.209.300,00
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	858.209.483	4.028.746.548,00
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	366.188.423	621.187.603,00



BAB III
AKUNTABILITAS KERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A. Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi setiap indikator kinerja program dan didukung dengan data-data yang relevan untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi dalam mencapai target Indikator Kinerja Utamanya (IKU) yang telah tertuang dalam tujuan dan sasaran strategis instansi.

Adapun capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis.	Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%



2.	Meningkatnya kualitas kelitbangan daerah	Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria IID (Indeks Inovasi Daerah)	72%	87,76%	121,89%	78%	112,51%
3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah perangkat daerah	Nilai SAKIP	A (85,50)	A (86,57)	101,25%	A (85,53)	101,22%
		Nilai RB	32,67	-	-	32,70	-
		Nilai IPP	B (3,6)	B (3,76)	104,44%	B (3,63)	103,58%
		Nilai SKM	Sangat Baik (92,00)	Sangat Baik (96,56)	104,96%	Sangat Baik (92,00)	104,96%

Penjelasan :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis.

a. Indikator Kinerja 1 : Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan RPJMD

Tabel 3. 2

Capaian IK 1 : Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan RPJMD

Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
100%	100%	100%	100%	100%

Capaian indikator kinerja (IK) Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan RPJMD tahun 2023 dengan realisasi 100% dari target 100%, dengan persentase sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 100%, maka pada tahun 2023 sudah tercapai nilai 100%, dengan persentase capaian sebesar 100%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan atau tren meningkat hal ini disebabkan karena komitmen pemimpin dan para mitra dalam meningkatkan asistensi dan harmonisasi perencanaan, sebagaimana table berikut :

Tabel 3. 3

Tren Realisasi dari (IK) kesesuaian dokumen RKPD dengan RPJMD Tahun 2021 – 2023

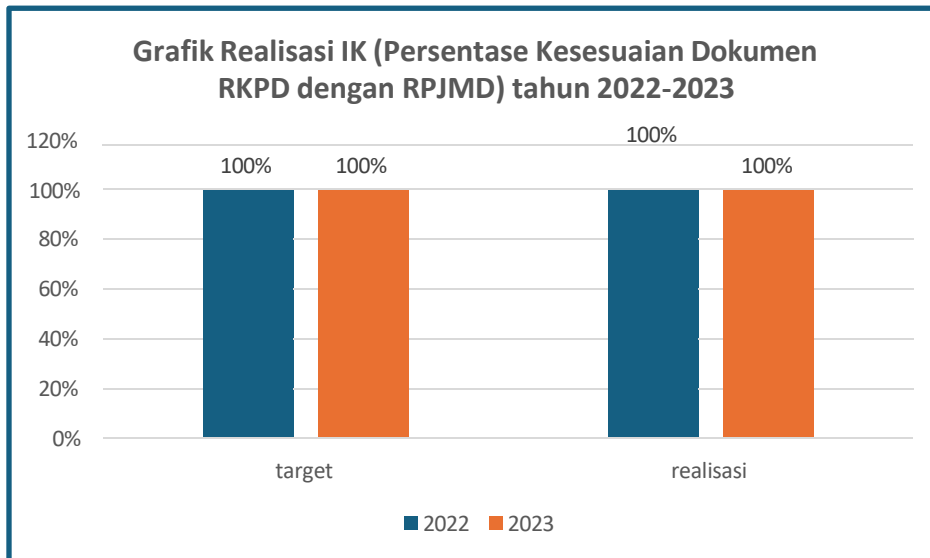
Tahun	2022	2023
Target	100%	100%
Realisasi	100%	100%
Capaian	100%	100%



Realisasi kinerja tahun 2023 dan 2022 pada sasaran pertama belum bisa dibandingkan dengan tahun 2021, karena sasaran dan indikator kinerja berubah.

Berikut merupakan grafik yang menyatakan perbandingan antara realisasi kinerja Persentase Kesesuaian Dokumen RKPD dengan RPJMD pada tahun 2022 dengan tahun 2023 :

*Grafik 3. 1
 Tren Realisasi dari (IK) Tahun 2022 - 2023*



Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran pertama yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Dan Sinergis. Berikut alternatif solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja.

- a. Melakukan review Renstra PD secara berkala agar terwujud keselarasan antara RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja.
- b. Meningkatkan kompetensi para perencana terkait perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan daerah sehingga dapat terwujud dokumen perencanaan yang berkualitas.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah

- a. Indikator Kerja 2 : Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria IID (Indeks Inovasi Daerah)

*Tabel 3. 4
 Capaian IK 2 : Persentase Inovasi daerah yang memenuhi kriteria IID*

Target	Realiasasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
72%	87,76%	121,89%	78%	112,51%

Capaian indikator kinerja (IK) Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria IID (Indeks Inovasi Daerah) tahun 2023 dengan realisasi 87,76% dari target 72%, dengan



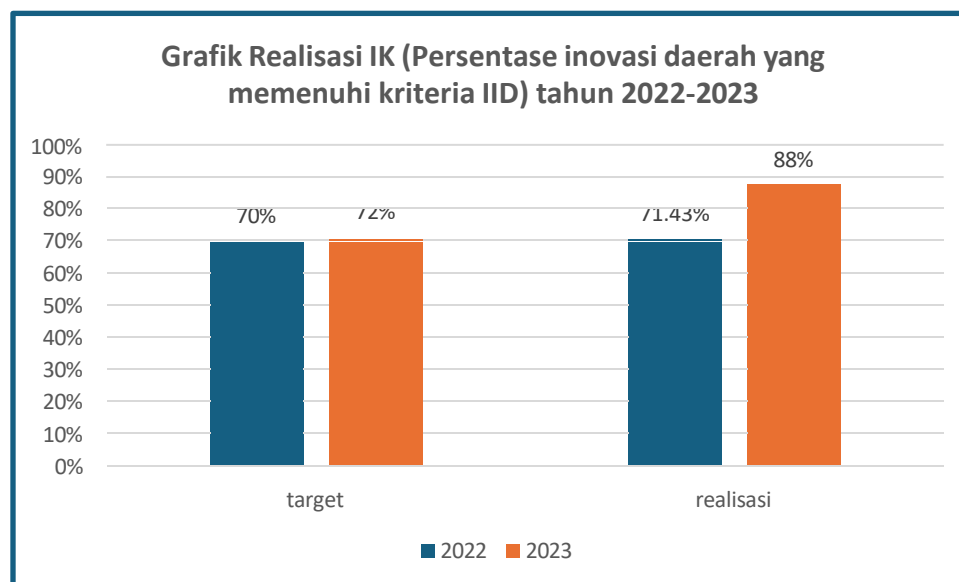
persentase sebesar 121,89%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 78%, maka pada tahun 2023 sudah tercapai nilai 78%, dengan persentase capaian sebesar 112,51%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena admin daerah terus melakukan pendampingan terhadap inovasi yang dilaporkan melalui aplikasi IID Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sebagaimana table berikut :

*Tabel 3.5
 Tren Realisasi dari (IK) Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria IID
 Tahun 2022 – 2023*

Tahun	2022	2023
Target	70%	72%
Realisasi	71,43%	87,76%
Capaian	103,04%	121,89%

Realisasi kinerja tahun 2023 dan 2022 pada sasaran kedua belum bisa dibandingkan dengan tahun 2021, karena sasaran dan indikator kinerja berubah. Berikut merupakan grafik yang menyatakan perbandingan antara realisasi kinerja Persentase Inovasi Daerah yang Memenuhi Kriteria IID pada tahun 2022 dengan tahun 2023 :

*Grafik 3.2
 Tren Realisasi dari (IK) Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria IID
 Tahun 2022 – 2023*



Berdasarkan pada grafik diatas dapat dinyatakan bahwa target pada Indikator Kinerja Persentase Inovasi Daerah yang memenuhi kriteria IID meningkat pada tahun 2023, dan realisasi capaian kerja meningkat pada tahun 2023.



Sehingga untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah. Berikut alternatif solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja.

- a. Melakukan komunikasi sekaligus evaluasi guna mengidentifikasi tantangan Perangkat Daerah dalam pelaporan inovasi untuk mendukung IID Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Setiap awal Tribulan selalu membuat surat yang ditujukan kepada Perangkat Daerah untuk mengajukan KAK jika memiliki kegiatan kajian, termasuk kewajiban menyampaikan policy brief masing-masing kajian.
- 3. Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah perangkat daerah.**
- a. Indikator Kinerja 1 : Nilai SAKIP

*Tabel 3. 6
 Capaian IK 3 : Nilai SAKIP*

Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
A (85,50)	A (86,57)	101,25%	A (85,53)	101,33%

Capaian indikator kinerja (IK) Nilai SAKIP tahun 2023 dengan realisasi A (85,53) dari target A (85,53), dengan persentase sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target A (85,53), maka pada tahun 2023 sudah tercapai nilai A (86,57), dengan persentase capaian sebesar 101,33%. Hal ini disebabkan oleh semangat komitmen yang kuat mulai dari pemimpin sampai dengan staf pelaksana untuk terus meningkatkan kedisiplinan dan menumbuhkan budaya kerja yang positif dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik melalui penarapan SAKIP, sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan atau tren meningkat, sebagaimana table berikut :

*Tabel 3. 7
 Tren Realisasi dari (IK) Tahun 2022 – 2023*

Tahun	2022	2023
Target	A	A (85,50)
Realisasi	A (85,50)	A (86,57)
Capaian	100%	101,25%



b. Indikator Kinerja 2 : Nilai RB

Berdasarkan pada Permen PANRB No.3 Tahun 2023 Nilai RB merupakan Nilai RB Tematik yang tidak terakomodir PMPRB sehingga tidak lagi dihitung. Sehingga pada tahun 2023 tidak terdapat publikasi Nilai RB.

c. Indikator Kinerja 3 : Nilai IPP

*Tabel 3. 8
 Capaian IK 5 : Nilai IPP*

Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
B (3,6)	B (3,76)	104,44%	B (3,63)	103,58%

Capaian indikator kinerja (IK) Nilai IPP tahun 2023 dengan realisasi 3,76% dari target B (3,6), dengan persentase sebesar 104,44%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target B (3,63), maka pada tahun 2023 sudah tercapai nilai B (3,6), dengan persentase capaian sebesar 103,58%, sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan atau tren meningkat. Peningkatan Indeks Pelayanan Publik disebabkan oleh peningkatan penyelenggara layanan publik, pengembangan inovasi informasi untuk mempermudah masyarakat terhadap layanan, peningkatan kualitas SDM di sektor pelayanan publik, sebagaimana table berikut :

*Tabel 3. 9
 Tren Realisasi dari (IK) Nilai IPP Tahun 2022 – 2023*

Tahun	2022	2023
Target	B	B (3,6)
Realisasi	B (3,59)	B (3,76)
Capaian	100%	104,44%

d. Indikator Kinerja 4 : Nilai SKM

*Tabel 3. 10
 Capaian IK 6 : Nilai SKM*

Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
92,00	96,56	104,99%	78%	104,99%

Capaian indikator kinerja (IK) Nilai SKM tahun 2023 dengan realisasi 96,56 dari target Sangat Baik (92,00), dengan persentase sebesar 104,99%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target Sangat Baik (92,00), maka pada



tahun 2023 sudah tercapai nilai Sangat Baik (92,00), dengan persentase capaian sebesar 104,99%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan atau tren meningkat. Hal ini dikarenakan Bappeda Kabupaten Sidoarjo berupaya terus memberikan pelayanan publik.

*Tabel 3. 11
Tren Realisasi dari (IK) Nilai SKM Tahun 2022 – 2023*

Tahun	2022	2023
Target	Baik	Sangat Baik (92,00)
Realisasi	Sangat Baik	Sangat Baik (96,56)
Capaian	100%	104,96%

B. Realisasi Kinerja Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2022 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut.

1. Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran

Capaian kinerja diatas juga harus tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Berikut merupakan tabel yang menyatakan Perbandingan antara perbandingan kinerja dan anggaran:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023
**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN SIDOARJO**



Tabel 3.12
 Analisis Efisiensi

SASARAN	INDIKATOR	Kinerja			Anggaran			tingkat efisiensi
		target	realisasi	% kinerja	target	realisasi	% anggaran	
				A	B	C		$\frac{(a*b)-c}{(a*b)*100\%}$
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis	Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan RPJMD	100,0	100,0	100,00%	5.326.955.848	5.227.094.691	98,13%	1,87%
Meningkatnya kualitas kelitbangan daerah	Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria IID (Indeks Inovasi Daerah)	72,00%	87,76%	121,89%	621.187.603	594.718.925	95,74%	21,45%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah perangkat daerah	Nilai SAKIP	100,00%	100,00%	103,54%	12.533.672.687	12.132.171.300	96,80%	6,51%
	Nilai RB	100,00%	100,00%					
	Nilai IPP	100,00%	100,00%					
	Nilai SKM	100,00%	100,00%					



Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran :

Berdasarkan pada hasil analisis terkait dengan efisiensi

Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis.	Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan RPJMD	100%	97,76%	2,24%
Meningkatnya kualitas kelitbangan daerah	Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria IID (Indeks Inovasi Daerah)	103,49%	95,74%	7,75%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah perangkat daerah	Nilai SAKIP	103,55%	96,80%	6,75%
	Nilai RB			
	Nilai IPP			
	Nilai SKM			
Rata-rata		102,83%	96,77%	5,58%

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka berdasarkan pada pencapaian tersebut dilakukan evaluasi dan didapatkan tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja sebagai berikut :

a. Program : Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Tindak lanjut dan upaya perbaikan kinerja :

- Melakukan review Renstra PD secara berkala agar terwujud keselarasan antara RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja.
- Meningkatkan kompetensi para perencana terkait perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan daerah sehingga dapat terwujud dokumen perencanaan yang berkualitas.

b. Program : Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tindak lanjut dan upaya perbaikan kinerja :

- Melakukan komunikasi sekaligus evaluasi guna mengidentifikasi tantangan Perangkat Daerah dalam pelaporan inovasi untuk mendukung IID Kabupaten Sidoarjo;
- Setiap awal Tribulan selalu membuat surat yang ditujukan kepada Perangkat Daerah untuk mengajukan KAK jika memiliki kegiatan kajian, termasuk kewajiban menyampaikan policy brief masing-masing kajian.

c. Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja :



- Membuat surat edaran kepada Perangkat Daerah untuk melaksanakan penelitian/kajian sesuai mekanisme dan penyampaian policy brief.
- Mengoptimalkan menu riset pada aplikasi SETIA.

d. Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja :

- Membuat media komunikasi dengan admin SETIA Perangkat Daerah guna memudahkan koordinasi, edukasi dan sosialisasi terkait inovasi daerah;
- Melakukan koordinasi dengan tenaga ahli pembuat aplikasi SETIA guna mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaporan inovasi daerah.

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Berikut merupakan tabel yang menyatakan program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja:



Tabel 3. 13
 Capaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran PD	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Pagu	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas perencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis.	Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan RPJMD	100	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.298.209.300,00	1.259.852.810,00	97,05
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.028.746.548,00	3.967.241.881,25	98,47
Meningkatnya kualitas kelitbangan daerah	Persentase Inovasi daerah yang memenuhi kriteria IID	103,49	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	621.187.603,00	594.718.925,00	95,74
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	101,25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.533.672.687,00	12.132.171,300	96,80
	Nilai RB	-				
	Nilai IPP	104,44				
	Nilai SKM	104,96				
Rata-rata		102,83				97,14



3. Realisasi Anggaran

Berikut merupakan tabel realisasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2023.

*Tabel 3. 14
 Realisasi Anggaran*

Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Perencanaan dan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah	1.298.209.300,00	1.259.852.810,00	97,05
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.028.746.548,00	3.967.241.881,25	98,47
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	621.187.603,00	594.718.925,00	95,74
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.533.672.687,00	12.132.171,300	96,80



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo** untuk tahun 2023 yaitu 3 Sasaran dengan kategori sangat berhasil. Namun begitu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan, sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat optimal. Berikut merupakan kendala yang dihadapi, yaitu :

1. Memastikan semua program/kegiatan dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen RKPD Tahun 2023 telah sesuai dan selaras dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo
2. Memastikan program dan kegiatan mulai dari RKPD, KUA-PPAS dan RAPBD selaras dan konsisten.
3. Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait dana transfer (DAK), sehingga akan berpengaruh pada konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dan adanya perubahan target kinerja Perangkat Daerah
4. Perangkat Daerah masih belum disiplin mematuhi mekanisme kelitbang terkait dengan pelaksanaan kajian beserta pelaporannya.
5. Masih adanya program/kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 tidak selaras dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo dikarenakan kebijakan nasional/pusat yaitu DAK.
6. Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah terhadap konsistensi indikator dan target kinerja dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.
7. Adanya penyesuaian kapasitas fiskal RAPBD Tahun 2024, sehingga dimungkinkan adanya perubahan target kinerja Perangkat Daerah.
8. Masih ditemukan Perangkat Daerah yang belum mematuhi mekanisme pelaksanaan penelitian/kajian;
9. Perangkat Daerah masih belum banyak mengetahui format dan substansi policy brief.

B. Pemecahan Masalah / Tindak Lanjut

Untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas, **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo** telah melakukan beberapa cara pemecahan masalah, antara lain:

1. Melakukan review Renstra PD secara berkala agar terwujud keselarasan antara RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja.
2. Meningkatkan kompetensi para perencana terkait perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan daerah sehingga dapat terwujud dokumen perencanaan yang berkualitas.



3. Melakukan komunikasi sekaligus evaluasi guna mengidentifikasi tantangan Perangkat Daerah dalam pelaporan inovasi untuk mendukung IID Kabupaten Sidoarjo;
4. Setiap awal Tribulan selalu membuat surat yang ditujukan kepada Perangkat Daerah untuk mengajukan KAK jika memiliki kegiatan kajian, termasuk kewajiban menyampaikan policy brief masing-masing kajian.
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan perencanaan pembangunan daerah
6. Melakukan pendampingan dan verifikasi Renja dan RKA Perangkat Daerah
7. Membuat surat edaran kepada Perangkat Daerah untuk melaksanakan penelitian/kajian sesuai mekanisme dan penyampaian policy brief.
8. Mengoptimalkan menu riset pada aplikasi SETIA
9. Membuat media komunikasi dengan admin SETIA Perangkat Daerah guna memudahkan koordinasi, edukasi dan sosialisasi terkait inovasi daerah;
10. Melakukan koordinasi dengan tenaga ahli pembuat aplikasi SETIA guna mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaporan inovasi daerah.

LAMPIRAN

- A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**
- B. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023**
- C. RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**
- D. POHON KINERJA YANG MENUNJANG SASARAN KINERJA 2023**
- E. CAPAIAN PRESTASI / PENGHARGAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**
- F. G. MATRIKS RENSTRA/RENJA**
- G. H. LHE SAKIP Tahun n-1**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

*Nama : Dr. HERI SOESANTO, SH., MH
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH*

Selanjutnya disebut pihak pertama.

*Nama : H. AHMAD MUHDLOR, S-IP
Jabatan : BUPATI SIDOARJO*

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

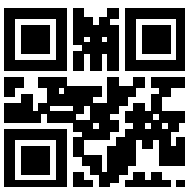
Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sidoarjo, 2 November 2023

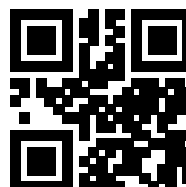
*Pihak Kedua,
BUPATI*

*Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH*



Ditandatangani secara elektronik oleh:

*H. AHMAD MUHDLOR,
S-IP*



Ditandatangani secara elektronik oleh:

*Dr. HERI SOESANTO, SH., MH
196805191988031002*

H. AHMAD MUHDLOR, S-IP

Dr. HERI SOESANTO, SH., MH

*Pembina Utama Muda
196805191988031002*



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	<i>Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis</i>	<i>Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan RPJMD</i>	100%
2	<i>Meningkatnya kualitas Kelitbangan Daerah</i>	<i>Persentase Inovasi Daerah yang memenuhi kriteria Indeks Inovasi Daerah (IID)</i>	72%
3	<i>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah</i>	<i>Nilai SAKIP</i>	85,50
		<i>Nilai RB</i>	32,67
		<i>Nilai IPP</i>	3,6 (B)
		<i>Nilai SKM</i>	92,00 (Sangat Baik)

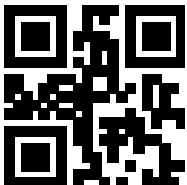
JUMLAH ANGGARAN 2023

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	<i>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</i>	<i>Rp. 621.187.603</i>	
2	<i>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</i>	<i>Rp. 4.028.746.548</i>	
3	<i>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</i>	<i>Rp. 1.298.209.300</i>	
4	<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>	<i>Rp. 12.533.672.687</i>	
JUMLAH		Rp. 18.481.816.138	

Sidoarjo, 2 November 2023

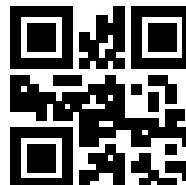
*Pihak Kedua,
BUPATI*

*Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH*



Ditandatangani secara elektronik oleh:

*H. AHMAD MUHDOR,
S-IP*



Ditandatangani secara elektronik oleh:

*Dr. HERI SOESANTO, SH., MH
196805191988031002*

H. AHMAD MUHDOR, S-IP

Dr. HERI SOESANTO, SH., MH

Pembina Utama Muda

196805191988031002



PAKTA INTEGRITAS

KABUPATEN SIDOARJO

Saya, Dr. HERI SOESANTO, SH., MH, KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH menyatakan sebagai berikut :

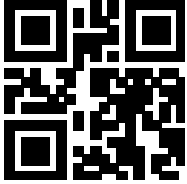
- 1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.*
- 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.*
- 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*
- 4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.*
- 5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.*
- 6. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas.*
- 7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.*
- 8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.*
- 9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sidoarjo, 2 November 2023

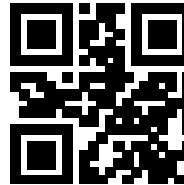
*Pihak Kedua,
BUPATI*

*Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH*



Ditandatangani secara elektronik oleh:

*H. AHMAD MUHDLOR,
S.IP*



Ditandatangani secara elektronik oleh:

*Dr. HERI SOESANTO, SH., MH
196805191988031002*

H. AHMAD MUHDLOR, S.IP

Dr. HERI SOESANTO, SH., MH

Pembina Utama Muda

196805191988031002



PERJANJIAN KINERJA 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. HERI SOESANTO, SH., MH
*Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH*

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. AHMAD MUHDLOR, S-IP
Jabatan : BUPATI SIDOARJO

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

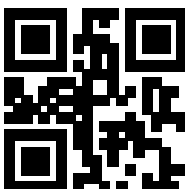
Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sidoarjo, 26 Januari 2023

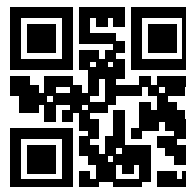
*Pihak Kedua,
BUPATI*

*Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH*



Ditandatangani secara elektronik oleh:

*H. AHMAD MUHDLOR,
S-IP*



Ditandatangani secara elektronik oleh:

*Dr. HERI SOESANTO, SH., MH
196805191988031002*

H. AHMAD MUHDLOR, S-IP

Dr. HERI SOESANTO, SH., MH

Pembina Utama Muda

196805191988031002



PERJANJIAN KINERJA 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	<i>Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis</i>	<i>Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan RPJMD</i>	100%
2	<i>Meningkatnya kualitas Kelitbangan Daerah</i>	<i>Persentase Inovasi Daerah yang memenuhi kriteria Indeks Inovasi Daerah (IID)</i>	72%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Tambahan	Target
1	<i>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah</i>	<i>Nilai SAKIP</i>	<i>85-50</i>
		<i>Nilai RB</i>	<i>32-67</i>
		<i>Nilai IPP</i>	<i>3-6 (B)</i>
		<i>Nilai SKM</i>	<i>92-00 (Sangat Baik)</i>

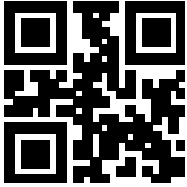
JUMLAH ANGGARAN 2023

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>	<i>Rp. 11.719.498.612</i>	
2	<i>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</i>	<i>Rp. 858.209.483</i>	
3	<i>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</i>	<i>Rp. 3.542.449.866</i>	
4	<i>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</i>	<i>Rp. 366.188.423</i>	
	JUMLAH	<i>Rp. 16.486.346.384</i>	

Sidoarjo, 26 Januari 2023

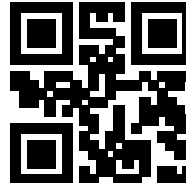
*Pihak Kedua,
BUPATI*

*Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH*



Ditandatangani secara elektronik oleh:

*H. AHMAD MUHDLOR,
S-IP 0*



Ditandatangani secara elektronik oleh:

*Dr. HERI SOESANTO, SH., MH
196805191988031002*

H. AHMAD MUHDLOR, S-IP

Dr. HERI SOESANTO, SH., MH

Pembina Utama Muda

196805191988031002



PAKTA INTEGRITAS

KABUPATEN SIDOARJO

Saya, Dr. HERI SOESANTO, SH., MH, KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH menyatakan sebagai berikut :

- 1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.*
- 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.*
- 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*
- 4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.*
- 5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.*
- 6. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas.*
- 7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.*
- 8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.*
- 9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

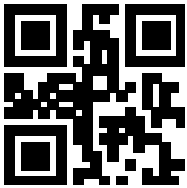
Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sidoarjo, 26 Januari 2023

*Pihak Kedua,
BUPATI*

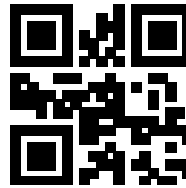
*Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH*

*Ditandatangani secara
elektronik oleh:*



*H. AHMAD
MUHDLOR, S-IP O*

*Ditandatangani secara
elektronik oleh:*



*Dr. HERI SOESANTO, SH., MH
196805191988031002*

B.INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN
2023



INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

RPJMD

- Sasaran RPJMD** : *Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital*
- Visi 1** : *Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan.*
- Misi 1** : *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha*

Tugas dan Fungsi PD:

- Tugas** : Membantu Bupati Dalam Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
- Fungsi**
- 1 Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian, Pengembangan dan Data;
 - 2 Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - 3 Pengkoordinasian dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 4 Pengkoordinasian Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 5 Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Sesuai Dengan Lingkup Tugasnya;
 - 6 Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya.
- Tujuan**
- 1 Meningkatkan kualitas perencanaan dan kelitbangan daerah
- Indikator Tujuan**
- a. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis
 - b. Meningkatnya kualitas Kelitbangan Daerah
 - c. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR/PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis	Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan RPJMD	$\frac{\sum \text{Program RKPD yang selaras dengan RPJMD pada tahun } n}{\sum \text{Program RPJMD pada tahun } n} \times 100 \%$ <p>Penjelasan : Jumlah program RKPD yang selaras dengan RPJMD pada tahun n dibagi jumlah seluruh program RPJMD pada tahun n</p> <p>* Selaras diukur dari kesamaan nomenklatur Program</p>	Dokumen RKPD dan RPJMD	Bidang Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	1 Nilai SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam . Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Dokumen SAKIP/LKjIP PD	SEKRETARIAT
		2 Nilai RB	Penjelasan : Penilaian RB mencakup penilaian terhadap dua komponen: Pengungkit (Enablers) dan Hasil(Results). Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit	Dokumen/Laporan Reformasi Birokrasi	SEKRETARIAT
		3 Nilai IPP	Penjelasan : Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan , Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem	Dokumen/Laporan IPP	SEKRETARIAT
		4 Nilai SKM	<u>Penjelasan : Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh data hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya</u>	Dokumen/Laporan SKM	SEKRETARIAT

3	Meningkatnya kualitas kelitbangan daerah	Persentase Inovasi Daerah yang memenuhi kriteria IID	$\frac{\sum \text{Inovasi daerah yang memenuhi kriteria IID}}{\text{-----}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan : untuk mengukur jumlah inovasi daerah yang memenuhi kriteria IID dibandingkan dengan jumlah inovasi secara keseluruhan.</p>	Inovasi Daerah, dokumen kajian penelitian, rekomendasi	Bidang Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
---	---	--	---	--	--

Sidoarjo, 10 Januari 2023

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. HERI SOESANTO, SH., MH
NIP. 196805191988031002

Dr. HERI SOESANTO, SH., MH

Pembina Utama Muda
NIP.19680519198803100

C. RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN
2023

Pastikan Sebelum Mengisi Bulan di Rencana Aksi Data di Perencanaan Kinerja Sudah BENAR

User Email: 19080519190803110

Pilih Data

2023 - KEPILA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jabatan Anda

KEPILA BADAN PERENCANAAN

- Dashboard
- Perencanaan Kinerja
- Tugas Aktivitas
- Perjanjian Kinerja
- Rencana Aksi**
- Penetapan Target
- Realisasi
- Penetapan Realisasi
- Coaching
- Penilaian Aktivitas
- Laporan
- Coaching Bawahan
- Perilaku
- Validasi Angka Kredit
- Laporan Aktivitas
- Evaluasi Kinerja
- Angka Kredit
- Panduan Penggunaan

#	Sasaran Kinerja	Rencana Hasil Kinerja	Aspek	Indikator Kinerja Individu	Target (Sesuai Ekspektasi)	Periode Penilaian	Bulan Pemantauan Hasil Kerja												Sumber Data	Aksi			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	Kualitas Perencanaan dan Kelibangan yang Baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis	Kuantitas / Kualitas / Waktu / Biaya	Persentase kesesuaian dokumen RPKD dengan RPJMD	90-100%	pertahun														Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Konsistensi			
		Monitoring pelaksanaan evaluasi konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah			90-99%	pertahun															Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
		Supervisi pelaksanaan asistensi perencanaan Perangkat Daerah			49 OPO dengan hasil baik	perenambulan																SA Verifikasi asistensi perencanaan Perangkat Daerah	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah		Kuantitas / Kualitas / Waktu / Biaya	Jumlah inovasi dalam praktik baik yang mendukung Reformasi Birokrasi	1 inovasi	pertahun														Laporan/ Proposal Inovasi OPO		
		Menetapkan SK Tim RB				Tersedianya SK Tim RB	pertahun															Internal	
		Penyajian inovasi untuk pemenuhan praktik baik				Terwujudnya inovasi untuk pemenuhan praktik baik	pertahun																Data Internal
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah		Kuantitas / Kualitas / Waktu / Biaya	Nilai IPP	B (3,51-4)	pertahun														Hasil penilaian terhadap 6 aspek baik secara survei dan penilaian langsung oleh Sekretariat Daerah		
		Terlaksananya bevu Standar Pelayanan (SP) Secara Berkala				Terlaksananya Revisi Standar Pelayanan (SP) Secara Berkala disertai notulen	pertahun															Data Internal	
		Terlaksananya Evaluasi Internal dalam rangka pemenuhan dokumen IPP				Terlaksananya Evaluasi Internal dalam rangka pemenuhan dokumen IPP	pertribulan																Data Internal

Jabatan Anda

KEPALA BADAN PERENCANA

- Dashboard
- Perencanaan Kinerja
- Tugas Aktivitas
- Perjanjian Kinerja
- Rencana Aksi**
- Penetapan Target
- Realisasi
- Penetapan Realisasi
- Coaching
- Penilaian Aktifitas
- Laporan
- Coaching Bawahan
- Perilaku
- Validasi Angka Kredit
- Laporan Aktifitas
- Evaluasi Kinerja
- Angka Kredit
- Panduan Penggunaan

Meningkatnya kualitas Kelitbitan Daerah	Kuantitas / Kualitas / Waktu / Biaya	Persentase Inovasi Daerah yang memenuhi kriteria Indeks Inovasi Daerah (IID)	72%	pertahun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan Indeks Inovasi Daerah	<input type="lock"/>
Mengevaluasi hasil IID 2022			Tepat Waktu	pertahun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan Hasil Evaluasi	<input type="lock"/>
Supervisi asistensi pelaporan IGA 2023			90-95%	pertahun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data Internal	<input type="lock"/>
Melaporkan Inovasi Daerah Tahun 2023			Tepat Waktu	pertahun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data Eksternal Aplikasi	<input type="lock"/>
Menyusun Perbup penetapan Inovasi			Tepat Waktu	pertahun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dok Internal	<input type="lock"/>
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Kuantitas / Kualitas / Waktu / Biaya	Nilai SAKIP	Jika mendapat Nilai A (80.01-90.00) untuk SAKIP Tahun 2023	pertahun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LHE Penilaian SAKIP dari Tim Penilai SAKIP Daerah / Inspektorat	<input type="lock"/>
Menetapkan SK Tim SAKIP			SK Tim SAKIP	pertahun	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dok Internal	<input type="lock"/>
Tersedianya kelengkapan pelaksanaan rewu Renstra dengan dokumen pendukung berupa kelengkapan penjadwalan dan dokumentasi hasil kegiatan rewu			Tersedianya kelengkapan pelaksanaan rewu Renstra beserta lampiran	pertahun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Renstra	<input type="lock"/>
Tersedianya IKU yang ditetapkan secara formal dan telah disesuaikan dengan perjanjian kinerja secara lengkap dengan DO, Formulasi Perhitungan, Sumber Data dan penanggung jawab			Tersedianya IKU secara formal Tepat Waktu dan lengkap dengan rincian	pertahun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data Internal	<input type="lock"/>
Tersedianya kelengkapan dokumen pelaksanaan Rewu atas dokumen laporan kinerja tahunan LKJP			Tersedianya kelengkapan dokumen Rewu LKJP Tepat Waktu	pertahun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	dok lkjp opd	<input type="lock"/>
Tertindakannya Peningkatan Profesionalitas ASN	Kuantitas / Kualitas / Waktu / Biaya	Jumlah JP yang diikuti dalam peningkatan kompetensi	Minimal mengikuti 20 JP	pertahun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sertifikat dan Pelaporan	<input type="lock"/>
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Kuantitas / Kualitas / Waktu / Biaya	Nilai SKM	B (baik) (76,63 sd 88,3)	pertribulan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dikeluarkan melalui sistem Aplikasi Layanan survei dari Bagian Organisasi	<input type="lock"/>

Rencana Aksi :

Target tahun diinformasikan oleh jabatan

D. POHON KINERJA YANG MENUNJANG
SASARAN KINERJA 2023

PETA KINERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kualitas Perencanaan dan Kelitbangan yang Baik

·.../Pelayanan kesekretariatan yang prima

...../...../..... /Pengelolaan kepegawaian yang baik

...../...../..... /Peningkatan kompetensi SDM

...../...../..... /Pengelolaan Administrasi karier yang tertib

...../...../..... /Pengelolaan aset yang sesuai ketentuan

...../...../..... /Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset sesuai ketentuan

...../...../..... /Pengelolaan surat dan arsip yang tertib

...../...../..... /Terpeliharanya Kendaraan Bermotor

...../...../..... /Pengelolaan Dokumen Kepegawaian, Keuangan dan Kearsipan yang tertib

...../...../..... /Pelayanan difasilitasi sesuai ketentuan

...../...../..... /Layanan Pengaduan sesuai ketentuan

...../...../..... /Layanan Pimpinan /Tamuh/ Konsumen yang baik

...../...../..... /Perencanaan dan pelaporan kinerja OPD yang efektif

...../...../..... /Pengelolaan keuangan yang akuntabel

...../...../..... /Berkas Pengadaan Terdokumentasikan dan Sesuai Ketentuan

...../...../..... /Perencanaan dan Pengadaan Barang dan Jasa yang sesuai ketentuan

...../...../..... /Penyajian informasi yang update dan akurat

...../...../..... /Pengelolaan pelaporan dan informasi yang update

...../...../..... /Perencanaan Urusan Infrastruktur yang Selaras

·.../Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Selaras

...../...../..... /Perencanaan Urusan Kewilayahan yang Selaras

·.../Perencanaan Urusan Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta alternatif pembiayaan yang Selaras

...../...../..... /Perencanaan Urusan SDA yang Selaras

...../...../..... /Memastikan Konsistensi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Perencanaan PD

...../...../..... /Tersedianya Alternatif Pembiayaan Non APBD yang Optimal

·.../Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Selaras

...../...../..... /Perencanaan Urusan Pembangunan Manusia yang Selaras

...../...../..... /Perencanaan Urusan Pemerintahan yang Selaras

·.../Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Sesuai Ketentuan

...../...../..... /Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

...../...../..... /Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai ketentuan

·.../Kelitbangan Daerah yang Berkualitas

...../...../..... /Tersedianya Penelitian/ Kajian dan Pengembangan yang digunakan sebagai dasar perencanaan

E. CAPAIAN PRESTASI / PENGHARGAAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023









BUPATI SIDOARJO

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SEBAGAI

PERINGKAT KEDUA

PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

Dengan Nilai Indeks SAKIP 86,57 Predikat A

Sidoarjo, 17 Januari 2024

BUPATI SIDOARJO



Ahmad Muhdlor
AHMAD MUHDLOR, S.IP

G. MATRIKS RENSTRA/RENJA

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021-2025

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Perangkat Kinerja						
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan Dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Kemudahan Berusaha	Meningkatkan kualitas perencanaan dan kelibnetan daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis	Persentase kesesuaian dokumen RKPd dengan RPJMD	1. Program Perencanaan dan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi antara dokumen perencanaan terhadap dokumen penganggaran daerah	N/A	Rp 2.329.478.703	100%	Rp 1.438.665.538	100%	Rp 1.498.800.805	100%	Rp 1.513.788.813	100%	Rp 1.528.926.701	100%	Rp 1.544.215.968	100%	Rp 1.544.215.968	Bid. Redalev Libangda						
						Persentase kesesuaian dokumen RKPd terhadap dokumen RPJMD	N/A		100%		100%		100%		100%		100%		100%			100%		100%			
											1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	N/A	Rp 2.033.473.251	2 Dokumen	Rp 826.769.928											
												Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan				2 Dokumen	Rp 761.209.412	3 Dokumen (RPJPD)	Rp 768.821.506	3 Dokumen (RPJMD)		Rp 776.509.721	2 Dokumen	Rp 784.274.818	2 Dokumen	Rp 784.274.818	
											1. Analisis Kondisi Daerah, Pemmasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	Rp 94.750.000	2 Dokumen	Rp 95.697.500	1 Dokumen		Rp 96.654.475	1 Dokumen	Rp 97.621.020	1 Dokumen	Rp 97.621.020	
											2. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				2 Dokumen	Rp 69.750.000	0	Rp 70.447.500	0		Rp 71.151.975	0	Rp 71.863.495	0	Rp 71.863.495	
											3. Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Konsultasi Publik yang diselenggarakan	N/A	Rp -	1 Kegiatan	Rp 62.837.500											
												Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	Rp 86.750.000	1 Berita Acara	Rp 87.617.500	2 Berita Acara		Rp 88.493.675	1 Berita Acara	Rp 89.378.612	1 Berita Acara	Rp 89.378.612	
											4. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Daerah	Jumlah Forum PD/Lintas PD yang diselenggarakan	2 Kegiatan	Rp 75.000.000	1 Kegiatan	Rp 101.100.000											
												Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	Rp 19.412.500	1 Berita Acara	Rp 19.606.625	1 Berita Acara		Rp 19.802.691	1 Berita Acara	Rp 20.000.718	1 Berita Acara	Rp 20.000.718	
											5. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Musrenbang perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan sesuai ketentuan	4 Tahapan	Rp 111.875.000	1 Kegiatan	Rp 61.812.500											
												Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	Rp 49.675.000	1 Berita Acara	Rp 50.171.750	2 Berita Acara		Rp 50.673.468	1 Berita Acara	Rp 51.180.202	1 Berita Acara	Rp 51.180.202	
											6. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				2000 Usulan	Rp 19.500.000	0	Rp 19.695.000	0		Rp 19.891.950	0	Rp 20.090.870	0	Rp 20.090.870	
											7. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan daerah yang disusun	3 Dokumen	Rp 1.846.598.251	2 Dokumen	Rp 601.019.928											
												Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/ RKPd)				2 Dokumen	Rp 421.371.912	3 Dokumen	Rp 425.585.631	3		Rp 429.841.487	2 Dokumen	Rp 434.139.902	2 Dokumen	Rp 434.139.902	
											2. Analisa data dan informasi pemerintah daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisa data dan informasi pemerintah daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dikelola					Rp 456.591.322	4 Dokumen	Rp 461.157.235	3 Dokumen		Rp 465.768.808	2 Dokumen	Rp 470.426.496	2 Dokumen	Rp 470.426.496	
											1. Pembiinan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi					Rp 456.591.322	100 Orang	Rp 461.157.235	100 Orang		Rp 465.768.808	100 Orang	Rp 470.426.496	100 Orang	Rp 470.426.496	

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Perangkat Kinerja	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
					Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	Rp 170.700.000	4 Laporan	Rp 172.407.000	4 Laporan	Rp 174.131.070	4 Laporan	Rp 175.872.381	4 Laporan	Rp 175.872.381	4 Laporan	Rp 175.872.381				
					2. Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kesesuaian dokumen Renja terhadap dokumen Renstra, PD bidang perekonomian dan SDA	N/A	Rp 1.611.404.647	100%	Rp 783.013.685	100%	Rp 766.016.975	100%	Rp 773.677.145	100%	Rp 781.413.916	100%	Rp 789.228.055	100%	Rp 789.228.055		
					1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah rekomendasi rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Bidang Perekonomian yang dihasilkan	1 Dokumen	Rp 54.416.747	Rekomenda	Rp 141.691.185												
					(RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	8 Dokumen	Rp 138.350.000	9 Dokumen	Rp 139.733.500	9 Dokumen	Rp 141.130.835	8 Dokumen	Rp 142.542.143	8 Dokumen	Rp 142.542.143	8 Dokumen	Rp 142.542.143				
					2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen Perencanaan PD Bidang Perekonomian yang disusun	3 Dokumen	Rp 470.000.000	3 Dokumen	Rp 295.000.000												
					Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6 OPD	Rp 19.516.975	6 OPD	Rp 19.712.145	6 OPD	Rp 19.909.266	6 OPD	Rp 20.108.359	6 OPD	Rp 20.108.359	6 OPD	Rp 20.108.359				
					3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PD Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monev Pelaksanaan Perencanaan PD Bidang Perekonomian	1 Laporan	Rp 92.400.000	1 Laporan	Rp -												
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6 OPD	Rp 14.250.000	6 OPD	Rp 14.392.500	6 OPD	Rp 14.536.425	6 OPD	Rp 14.681.789	6 OPD	Rp 14.681.789	6 OPD	Rp 14.681.789				
					4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rekomendasi Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Bidang Perekonomian yang dihasilkan	Rekomenda	Rp 125.400.000	Rekomendas	Rp 17.242.500												
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	Rp 185.000.000	4 Laporan	Rp 186.850.000	4 Laporan	Rp 188.718.500	4 Laporan	Rp 190.605.685	4 Laporan	Rp 190.605.685	4 Laporan	Rp 190.605.685				
					5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Jumlah rekomendasi rapat koordinasi penyusunan dokumen Bidang SDA yang dihasilkan	Rekomendas	Rp 27.787.500	Rekomendas	Rp 41.980.000												
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	5 Dokumen	Rp 4.750.000	6 Dokumen	Rp 4.797.500	6 Dokumen	Rp 4.845.475	5 Dokumen	Rp 4.893.930	5 Dokumen	Rp 4.893.930	5 Dokumen	Rp 4.893.930				

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Perangkat Kinerja
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode				
							Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)	Target (18)	Rp (19)	Target (20)	Rp (21)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
					6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan PD bidang SDA yang disusun	1 Dokumen	Rp 180.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000													
					Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA					3 OPD	Rp 99.400.000	3 OPD	Rp 100.394.000	3 OPD	Rp 101.397.940	3 OPD	Rp 102.411.919	3 OPD	Rp 102.411.919			
					7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Movev Pelaksanaan Perencanaan PD Bidang SDA	1 Laporan	Rp 560.800.000	1 Laporan	Rp 90.000.000													
					Pembangunan PD Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA					3 OPD	Rp 4.750.000	3 OPD	Rp 4.797.500	3 OPD	Rp 4.845.475	3 OPD	Rp 4.893.930	3 OPD	Rp 4.893.930			
					8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah rekomendasi rapat Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Bidang SDA yang dihasilkan	1 Laporan	Rp 100.600.400	Rekomenda	Rp 97.100.000													
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA					4 Laporan	Rp 300.000.000	4 Laporan	Rp 303.000.000	4 Laporan	Rp 306.030.000	4 Laporan	Rp 309.090.300	4 Laporan	Rp 309.090.300			
					3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian dokumen Renja terhadap dokumen Renstra,PD bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100%	Rp 1.252.400.291	100%	Rp 1.142.051.686	100%	Rp 1.840.265.487	100%	Rp 1.858.668.142	100%	Rp 1.877.254.823	100%	Rp 1.896.027.372	100%	Rp 1.896.027.372			
					1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah rekomendasi rapat Koordinasi penyusunan dokumen Bidang Infrastruktur yang dihasilkan	2 Rekomendas	Rp 438.475.000	2 Rekomendas	Rp 167.838.400													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					7 Dokumen	Rp 1.037.200.000	5 Dokumen	Rp 1.047.572.000	5 Dokumen	Rp 1.058.047.720	5 Dokumen	Rp 1.068.628.197	5 Dokumen	Rp 1.068.628.197			
					2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan PD Bidang Infrastruktur yang disusun	5 Dokumen	Rp 349.375.586	3 Dokumen	Rp 502.381.050													
					Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur					3 OPD	Rp 34.057.387	3 OPD	Rp 34.397.961	3 OPD	Rp 34.741.940	3 OPD	Rp 35.089.360	3 OPD	Rp 35.089.360			
					3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah laporan hasil movev pelaksanaan PD Bidang Infrastruktur	3 Laporan	Rp 110.850.000	2 Laporan	Rp 32.058.800													
					Pembangunan PD Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur					3 OPD	Rp 20.908.100	3 OPD	Rp 21.117.181	3 OPD	Rp 21.328.353	3 OPD	Rp 21.541.636	3 OPD	Rp 21.541.636			

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Perangkat Kinerja
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode				
							Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)	Target (18)	Rp (19)	Target (20)	Rp (21)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
					4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah rekomendasi rapat Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Bidang Infrastruktur yang dihasilkan	1 Rekomendasi	Rp 9.500.000	8 Berita Acara	Rp 37.361.500													
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang Infrastruktur					3 Laporan	Rp 296.025.000	4 Laporan	Rp 298.985.250	4 Laporan	Rp 301.975.103	4 Laporan	Rp 304.994.854	4 Laporan	Rp 304.994.854			
					5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah rekomendasi rapat Koordinasi penyusunan dokumen Bidang Kewilayahan yang dihasilkan	1 Rekomendasi	Rp 12.875.000	1 Rekomendasi	Rp 8.182.500													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)					3 Dokumen	Rp 225.000.000	3 Dokumen	Rp 227.250.000	3 Dokumen	Rp 229.522.500	3 Dokumen	Rp 231.817.725	3 Dokumen	Rp 231.817.725			
					6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan PD Bidang Kewilayahan yang disusun	N/A	Rp 209.249.705	2 Dokumen	Rp 217.603.136													
					Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan					3 OPD	Rp 20.000.000	3 OPD	Rp 20.200.000	3 OPD	Rp 20.402.000	3 OPD	Rp 20.606.020	3 OPD	Rp 20.606.020			
					7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PD Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil monev pelaksanaan perencanaan PD Bidang Kewilayahan	1 Laporan	Rp 122.075.000	3 Laporan	Rp 155.831.600													
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan					3 OPD	Rp 21.050.000	3 OPD	Rp 21.260.500	3 OPD	Rp 21.473.105	3 OPD	Rp 21.687.836	3 OPD	Rp 21.687.836			
					8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah rekomendasi rapat Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Bidang Kewilayahan yang dihasilkan	N/A	Rp -	4 Berita Acara	Rp 20.794.700													
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang Kewilayahan					1 Laporan	Rp 186.025.000	4 Laporan	Rp 187.885.250	4 Laporan	Rp 189.764.103	4 Laporan	Rp 191.661.744	4 Laporan	Rp 191.661.744			
Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya kualitas kelitbang Daerah	Persentase Inovasi daerah yang memenuhi kriteria IID	3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase PD yang memiliki kegiatan mendukung IID	Persentase hasil penelitian/kajian yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	N/A	Rp 739.216.646	70%	Rp 982.281.825	72%	Rp 1.383.005.923	74%	Rp 1.396.835.982	76%	Rp 1.410.804.342	78%	Rp 1.424.912.385	78%	Rp 1.424.912.385	78%	Rp 1.424.912.385	Bid. Redalew Litbangda	
							N/A			92%		94%		96%		98%			98%				
					1. Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Persentase hasil penelitian/kajian bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	N/A	Rp 374.000.000	90%	Rp 661.575.000	92%	Rp 152.632.500	94%	Rp 154.158.825	96%	Rp 155.700.413	98%	Rp 157.257.417	98%	Rp 157.257.417			

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Perangkat Kinerja	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode			
							Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)	Target (18)	Rp (19)	Target (20)	Rp (21)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
					1. Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah laporan hasil penelitian/kajian bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun	2 Laporan	Rp 358.250.000	7 Laporan	Rp 661.575.000												
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah					1 Laporan	Rp 152.632.500	1 Laporan	Rp 154.158.825	1 Laporan	Rp 155.700.413	1 Laporan	Rp 157.257.417	1 Laporan	Rp 157.257.417		
					2. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	1. Jumlah dokumen Penelitian yang dihasilkan	1 Dokumen	Rp 15.750.000	N/A	Rp												
						2. Jumlah hasil penelitian yang diexpose	1 Dokumen															
						3. Jumlah indeks pada IKU yang disusun	2 Dokumen															
						4. Jumlah Sistem Informasi litbang yang dikelola	1 Sistem															
					2. Pengembangan inovasi dan teknologi	Persentase Hasil Penelitian/ Pengembangan/ Perekrayasaan Bidang Inovasi dan Teknologi yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	N/A	Rp 365.216.646	90%	Rp 320.706.825	92%	Rp 1.230.373.423	94%	Rp 1.242.677.157	96%	Rp 1.255.103.929	98%	Rp 1.267.654.968	98%	Rp 1.267.654.968		
					1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah laporan penelitian/ pengembangan/ perekayasaan bidang inovasi dan teknologi yang disusun	1 Laporan	Rp 365.216.646	1 Laporan	Rp 253.756.825												
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi					1 Dokumen	Rp 213.555.923	1 Dokumen	Rp 215.691.482	1 Dokumen	Rp 217.848.397	1 Dokumen	Rp 220.026.881	1 Dokumen	Rp 220.026.881		
					2. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah diseminasi/ sosialisasi hasil kelitbangan yang dilaksanakan	N/A	Rp	1 Kegiatan	Rp 66.950.000												
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan					0	Rp 539.592.500	2 Laporan	Rp 544.988.425	2 Laporan	Rp 550.438.309	2 Laporan	Rp 555.942.692	2 Laporan	Rp 555.942.692		
					3. Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual					0	Rp 238.612.500	1 Laporan	Rp 240.998.625	1 Laporan	Rp 243.408.611	1 Laporan	Rp 245.842.697	1 Laporan	Rp 245.842.697		
					4. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif					0	Rp 238.612.500	1 Laporan	Rp 240.998.625	1 Laporan	Rp 243.408.611	1 Laporan	Rp 245.842.697	1 Laporan	Rp 245.842.697		
		Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	4. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Tingkat Kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	N/A	Rp 13.063.202.084	82%	Rp 11.707.987.134	84%	Rp 11.885.603.542	86%	Rp 12.004.459.577	88%	Rp 12.124.504.173	90%	Rp 12.245.749.215	90%	Rp 12.245.749.215			Sekretariat
			Nilai RB	1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	N/A	Rp 170.031.270	100%	Rp 65.883.500													
			Nilai IPP		1. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan					5 Dokumen	Rp 141.320.000	4 Dokumen	Rp 142.733.200	5 Dokumen	Rp 144.160.532	5 Dokumen	Rp 145.602.137	5 Dokumen	Rp 145.602.137			

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Perangkat Kinerja
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					36 Laporan	Rp 310.000.000	36 Laporan	Rp 313.100.000	36 Laporan	Rp 316.231.000	36 Laporan	Rp 319.393.310	36 Laporan	Rp 319.393.310	
					3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah pengelola keuangan dan barang dan Tenaga Non ASN yang terbayar	26 Orang	Rp 1.256.167.200	43 Orang	Rp 1.273.677.845											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					36 Laporan	Rp 1.375.227.200	36 Laporan	Rp 1.388.979.472	36 Laporan	Rp 1.402.869.267	36 Laporan	Rp 1.416.897.959	36 Laporan	Rp 1.416.897.959	
					5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	N/A	Rp 1.866.821.620	100%	Rp 423.000.000	100%	Rp 404.600.000	100%	Rp 408.646.000	100%	Rp 412.732.460	100%	Rp 416.859.785	100%	Rp 416.859.785	
					1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan Jumlah STNK Kendaraan yang lunas pajaknya	66 Unit	Rp 120.000.000	25 Unit	Rp 80.000.000											
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya					24 Unit	Rp 60.000.000	25 Unit	Rp 60.600.000	25 Unit	Rp 61.206.000	25 Unit	Rp 61.818.060	25 Unit	Rp 61.818.060	
					2. Pemeliharaan Mebel	Jumlah jaringan komputer, jaringan Wifi/LAN, serta peralatan gedung/kantor yang terpelihara	3 Jenis	Rp 136.000.000	6 Jenis	Rp 200.000.000											
						Jumlah Mebel yang Dipelihara					25 Unit	Rp 10.000.000	20 Unit	Rp 10.100.000	15 Unit	Rp 10.201.000	10 Unit	Rp 10.303.010	10 Unit	Rp 10.303.010	
					3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor yang dipelihara serta jumlah peralatan dan bahari kebersihan yang tersedia	N/A	Rp 1.109.803.148	1 Tahun	Rp 143.000.000											
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					20 Unit	Rp 185.000.000	20 Unit	Rp 186.850.000	18 Unit	Rp 188.718.500	16 Unit	Rp 190.605.685	16 Unit	Rp 190.605.685	
					4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang dipelihara	2 Unit	Rp 501.018.472	N/A	Rp -											
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi					1 Unit	Rp 149.600.000	1 Unit	Rp 151.096.000	1 Unit	Rp 152.606.960	1 Unit	Rp 154.133.030	1 Unit	Rp 154.133.030	
					6. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat					100%	Rp 50.000.000	100%	Rp 50.500.000	100%	Rp 51.005.000	100%	Rp 51.515.050	100%	Rp 51.515.050	
					1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					55 Orang	Rp 50.000.000	56 Orang	Rp 50.500.000	56 Orang	Rp 51.005.000	56 Orang	Rp 51.515.050	56 Orang	Rp 51.515.050	
					2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						Rp 32.769.587		Rp 30.097.283		Rp 33.428.255		Rp 33.762.538		Rp 33.762.538	
					7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	N/A	Rp -	100%	Rp 101.863.540											
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					10 Unit	Rp 146.190.000	12 Unit	Rp 147.651.900	14 Unit	Rp 149.128.419	16 Unit	Rp 150.619.703	16 Unit	Rp 150.619.703	

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Perangkat Kinerja	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
					1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	N/A	Rp	5 Jenis	Rp 101.863.540												
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					10 Unit	Rp 146.190.000	12 Unit	Rp 147.651.900	14 Unit	Rp 149.128.419	16 Unit	Rp 150.619.703	16 Unit	Rp 150.619.703		

H. LHE SAKIP Tahun n-1

BUPATI SIDOARJO

Jalan Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo



NOMOR : 700/15307/438.4/2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

PERIHAL : HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
SAKIP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KAB. SIDOARJO TAHUN 2023

KEPADA YTH : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN SIDOARJO



BUPATI SIDOARJO

Sidoarjo, 29 Desember 2023

Nomor : 700/15307/438.4/2023
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Evaluasi atas Implementasi
SAKIP Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2023

Kepada
Yth. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Sidoarjo
di
SIDOARJO

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah menugaskan tim dengan surat tugas nomor : 700/2258/438.4/2023 tanggal 31 Agustus 2023 untuk melaksanakan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di OPD Saudara. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat” untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Predikat	Interpretasi
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Adapun hasil penilaian implementasi AKIP di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

Komponen nilai SAKIP :

	Komponen yang dinilai	Nilai		
		Bobot	2022	2023
a.	Perencanaan Kinerja	30	26,01	26,20
b.	Pengukuran Kinerja	30	25,75	26,87
c.	Pelaporan Kinerja	15	13,50	12,50
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00	21,00
Nilai Hasil Evaluasi		100	85,26	86,57
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A	A

Dari hasil evaluasi dapat kami sampaikan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo memperoleh nilai **86,57** atau predikat **"A"**. *Penilaian tersebut menunjukkan Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.*

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen akuntabilitas kinerja dan penilaian risiko yang perlu diperhatikan beserta rekomendasi yang diperlukan sebagai berikut :

A. SIMPULAN HASIL EVALUASI

1. Perencanaan Kinerja

- a. Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021–2026 telah disusun dan ditetapkan serta dilakukan reuiu berkala tahunan 2023 yang dituangkan dalam berita acara tanggal 27 Juni 2023 beserta lampirannya yang menyajikan kondisi sebelum dan sesudah reuiu. Reuiu telah dilakukan secara berkala sesuai dengan SOP reuiu renstra yang telah ditetapkan.
- b. Dalam rangka implementasi manajemen risiko telah dilakukan penilaian risiko yang meliputi identifikasi risiko/*risk register* lengkap meliputi kegiatan-kegiatan yang terdapat pada 4 program yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja 2023. Selain itu juga telah dibuat analisa risikonya dan rencana tindak pengendalian atas masing-masing risiko dilengkapi dengan target waktu dan penanggung jawab risiko yang telah ditetapkan sebagai bentuk mitigasi risiko OPD.
- c. Monitoring atas target (kinerja) jangka menengah Renstra sampai dengan tahun berjalan telah disajikan dalam dokumen LAKIP tahun 2022 dengan simpulan yaitu 5 indikator kinerja capaiannya sangat berhasil / diatas 100% dan 1 indikator kinerja capaiannya berhasil. Analisa atas capaian masing-masing kinerja sebagai bahan tindak lanjut perbaikan ke depan terhadap rekomendasi yang diberikan juga telah disajikan.

- d. Rencana aksi atas kinerja, targetnya sudah selaras dengan target perjanjian kinerja dan telah dibuat periodik perbulan selama satu tahun. Rencana Aksi atas kinerja juga telah mencantumkan sub aktivitas kegiatan/ komponen rincian setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja individu sekaligus dilengkapi dengan target sesuai ekspektasi.
- e. Monitoring atas rencana aksi terhadap pencapaian kinerjanya terutama bagi pejabat mulai dari eselon 2, 3 dan 4 telah dilakukan secara berkala (minimal setiap 3 bulan) dipantau kemajuannya yaitu dengan membandingkan antara target dengan realisasi untuk masing-masing rencana aksi, sehingga jika ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya.

2. Pengukuran Kinerja

- a. IKU telah ditetapkan secara formal dan telah disesuaikan dengan perjanjian kinerja dan sudah dilengkapi dengan data kinerja berupa definisi operasional indikator kinerja utama, formulasi perhitungan, sumber data dan penanggung jawab yang kompeten atas penyajian data kinerjanya.
- b. Mekanisme pengumpulan data kinerja telah ada dan dapat diandalkan. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa kelengkapan sebagai berikut :
 - 1. Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date dan contoh laporan kegiatan OPD sudah dibuat termasuk juga SOP yang mengatur mekanisme apabila terdapat kesalahan atas data kinerja yang disajikan telah dibuat dan ditetapkan.
 - 2. Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid;
 - 3. Kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan;
 - 4. Terdapat penanggungjawab data kinerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

- c. IKU telah direviu secara berkala dan masih relevan dengan kondisi saat ini, namun hasilnya belum menunjukkan pada kondisi yang lebih baik atau sampai adanya inovasi (inovatif).
- d. Informasi terhadap efisiensi penggunaan anggaran belum disajikan dalam dokumen laporan kinerja, sehingga tidak dapat diketahui seberapa besar efisiensi atas penggunaan anggaran yang telah dicapai.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Dokumen laporan Kinerja OPD telah menyajikan informasi tentang capaian kinerja dan analisa penjelasannya. Perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya juga telah disajikan sehingga dapat diketahui informasi apakah kinerja lebih baik. Namun dengan pembanding lainnya yaitu capaian ditingkat nasional /RPJMN belum disajikan sebagai parameter keberhasilan ditingkat regional/nasional sekaligus pemicu kualitas kinerja OPD.
- b. Informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja OPD juga telah disajikan termasuk realisasi anggarannya per program dan kegiatan.
- c. Informasi atas tingkat efisiensi yang dicapai belum disajikan secara kuantitatif dan analisa secara kualitatif faktor-faktor penyebab keberhasilan atau pemicu atas pencapaian efisiensinya juga belum disajikan.
- d. Keberhasilan atas efisiensi yang telah dicapai juga belum disajikan secara komprehensif baik analisa penjelasannya maupun upaya atau inovasi yang telah dikembangkan oleh OPD dalam rangka efisiensi.
- e. Pelaksanaan reviu atas dokumen laporan kinerja tahunan (LAKIP) telah dilakukan.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Pelaksanaan evaluasi internal atas program dan kegiatan sudah dilakukan secara periodik per triwulan dengan menggunakan teknologi informasi/ aplikasi (e-Kinerja), namun belum terdapat perumusan tujuan evaluasi dan penentuan ruang lingkup evaluasi.

- b. Hasil evaluasi internal pada tiap-tiap tingkatan mulai eselon sampai dengan staf juga telah mencantumkan simpulan, rekomendasi dan tindak lanjut atau rencana upaya perbaikan kinerja.
- c. Laporan akuntabilitas kinerja OPD telah ditindaklanjuti sehingga telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan pemanfaatan atas hasil evaluasi, yaitu meliputi :
 1. Rekomendasi atas hasil-hasil evaluasi secara keseluruhan telah ditindaklanjuti;
 2. Peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi telah dilakukan;
 3. Hasil evaluasi telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
 4. Hasil evaluasi telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

B. REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen kinerja dan pengendalian risiko dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo, direkomendasikan perbaikan sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

- a. Meningkatkan kualitas dokumen Penilaian Risiko dengan melakukan identifikasi dan evaluasi risiko secara komprehensif dengan melibatkan semua pihak terkait dan mencakup berbagai jenis risiko baik risiko operasional maupun finansial.
- b. Melengkapi dokumen Rencana Kerja pada tahun-tahun berikutnya dengan rincian Tujuan dan Sasaran OPD beserta indikator kinerja dan target kinerjanya.
- c. Memanfaatkan hasil monitoring atas rencana aksi yang sebelumnya hanya terbatas pada pelaporan atau dokumentasi saja tanpa ada tindak lanjut nyata ditingkatkan menjadi bahan pengarahan, perbaikan dan pengorganisasian kegiatan yaitu antara lain :
 1. Target-target dalam rencana aksi dijadikan dasar (acuan) untuk (memulai) pelaksanaan setiap kegiatan/ sub kegiatan;

2. Target-target kinerja dalam rencana aksi dijadikan acuan untuk mengevaluasi capaian output-output kegiatan/ sub kegiatan;
3. Target-target kinerja dalam rencana aksi dijadikan alasan untuk memberikan otorisasi dan eksekusi apakah suatu kegiatan/ sub kegiatan tetap diteruskan pelaksanaannya atau ditunda.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Memanfaatkan hasil pengukuran/ capaian kinerja sebagai dasar pemberian *reward & punishment* bagi ASN di internal OPD secara kontinyu dan lebih optimal.
- b. Melengkapi hasil evaluasi Internal berkala tiap triwulan dengan analisa berupa simpulan apakah capaian kinerja individu telah menunjukkan adanya keberhasilan atau kegagalan, rekomendasi dari atasan langsung dan tindak lanjut atau rencana aksi perbaikannya sekaligus rencana waktu realisasi perbaikannya ke depan. Sehingga hasil evaluasi atas capaian kinerja tiap-tiap individu tersebut bisa dijadikan parameter dasar pemberian reward dan punishment kepada pegawai.
- c. Melakukan reuiu IKU secara berkala sampai pada kondisi yang lebih baik dengan disertai adanya perbaikan berupa inovasi dalam rangka peningkatan kinerja OPD.
- d. Melengkapi LAKIP tahun berikutnya dengan analisa terhadap efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen Laporan Kinerja sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014.
- b. Melengkapi dokumen Laporan Kinerja dengan cascading dan proses bisnis organisasi.
- c. Untuk tahun berikutnya untuk didalam penyusunan Laporan Kinerja agar menyajikan informasi pembanding capaian kinerja / *outcome* dengan capaian ditingkat nasional/RPJMN dan instansi yang sejenis sepanjang data kinerjanya selaras.
- d. Tetap mempertahankan kinerja yang telah mencapai target dan senantiasa intens untuk meningkatkan upaya-upaya dalam rangka

efisiensi anggaran sekaligus menciptakan inovasi pelayanan publik yang lebih berkualitas.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Meningkatkan kualitas evaluasi internal pada triwulan selanjutnya atas program dan kegiatan dengan menentukan perumusan tujuan evaluasi, penekanan penentuan ruang lingkup dan progress capaian langkah-langkah kongkrit sebagai tindak lanjut rekomendasi atas evaluasi triwulan -triwulan sebelumnya.
- b. Segera melakukan tindak lanjut atas evaluasi akuntabilitas kinerja OPD sehingga pemanfaatan atas hasil evaluasi menjadi optimal, yaitu meliputi :
 1. Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil-hasil evaluasi akuntabilitas kinerja;
 2. Meningkatkan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi;
 3. Memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
 4. Memanfaatkan hasil evaluasi dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja dan pengendalian risiko di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo, dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem AKIP di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya agar Saudara segera menindaklanjuti rekomendasi – rekomendasi tersebut dan dikirimkan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selaku Sekretaris Tim SAKIP Kabupaten.

Demikian untuk menjadi perhatian.



Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
di Jakarta
2. Gubernur Jawa Timur
Up. Inspektur Propinsi Jawa Timur
di Sidoarjo